



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01, Kode Pos 62254
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karanggeneng@lamongankab.go.id

Lamongan, // Juli 2024

Nomor : 800/ 470 /413.318/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025
Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.


CAMAT KARANGGENENG
DIAN SUKMANA, S.STP.MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19821008 200112 1 002

TEMBUSAN. Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



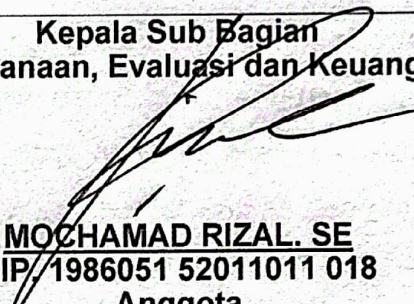


**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGGENENG**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01, Kode Pos 62254
Telepon (0322) 3382620, e-mail: karanggeneng@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	800 / 470 / 413.318/2025
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p>  <p>MOCHAMAD RIZAL. SE NIP. 1986051 52011011 018 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN KARANGGENENG</p>  <p>BUDIONO, SH.MM NIP. 19700928 199302 1 001 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT KARANGGENENG</p>  <p>DIAN SUKMANA, S.STP.M.Si NIP. 19821008 200112 1 002 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan karanggeneng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah..... dan yang belum dilaksanakan adalah....

Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
		Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Kegiatan OPD Kecamatan Karanggeneng:									
AKIP tidak ada peningkatan signifikan	RSO.23.99.43.01	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	April-25	April-25	Sudah
Desa Membangun tidak lami peningkatan yang an	RSO.23.99.43.02	-	-	-	-	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Mei-25	Juni-25	Sudah
Kegiatan OPD Kecamatan karanggeneng:									
in Publik yang tidak tepat	ROO.23.99.43.01	-	-	-	-	Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2025	Juni 2025	Sudah
terlaksanakannya anaan,penganggaran, dan si dengan baik	ROO.23.99.43.01	-	-	-	-	Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Karanggeneng telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	April-25	April-2025	Sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Penetapan Berita Acara Status Desa	Camat	Mei-2025	Juni-2025	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Juni 2025	Juni 2025	sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Juni 2025	Juni 2025	Sudah

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana